**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MADU HUTAN OLEH BALAI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
(BPDASHL) INDRAGIRI ROKAN
DI DESA SAHILAN DARUSSALAM KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

Jaya Pratama

E-mail : jayasabuak@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru Kode

Pos: 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Empowerment has been given by BPDASHL Indragiri Rokan to sailan honey farmer group, but sailan honey farmer group has not been independent because of the limited technology supporting production, capital, the existence of forest destruction, and lack of adequate marketing facilities. The theory used in this research is empowerment according to Winarni (1998:75), namely: (1) enabling, which includes motivating and awakening consciousness; (2) empowering, which includes education or knowledge, health, capital, technology, information, employment, markets; and (3) the creation of independence. This research uses qualitative method with descriptive research type. Data collecting technique used is interview technique, observation, and documentation. The result of the research can be concluded that: (1) empowerment of forest honey farmer community by Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan in Sahilan Darussalam Village, Gunung Sahilan Sub-District of Kampar Regency has not been optimal. Especially the aspect of empowering and the aspect of self-reliance. The empowering aspect has not been optimal because of the lack of attention to the level of knowlage of the farmer group in managging forest honey, paying less attention to the farmer group health, lack of appropriate technology aid, and lack of capital aid. So the aspect of creating self-sufficiently has not been optimal. (2) the inhibiting factors of the empowerment of forest honey farmers by Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan in Sahilan Darussalam Village, Gunung Sahilan sub-district, Kampar Regency are factors: (a) budget or funding; (b) there are still many people who have not been incorporated into farmer group; (c) lack of appropriate technology; and (d) illegal logging.

Keywords : *Empowerment, Honey Farmer, Forest*

Pendahuluan

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Dasar Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah Pasal 3 Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian pasal 18 Undang-undang nomor 17 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Melalui undang-undang tersebut, dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 pasal 1 tentang kedudukan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung bahwa: (1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan (2) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang Kepala.

Selanjutnya dalam pasal 2 tentang tugas pokok BPDASHL

Indragiri Rokan, disebutkan bahwa Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- 2) Penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
- 3) Pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS dan hutan lindung.
- 7) Pengembangan kelembagaan;
- 8) Penyusunan dan penyajian informasi pengelolaan DAS dan hutan lindung;
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Berdasarkan fungsi dari BPDASHL Indragiri Rokan tersebut, terdapat fungsi pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terutama kawasan

hutan dan lahan serta meningkatkan ekonomi. Masyarakat yang sadar lingkungan akan mengelola kawasan hutan dan lahan secara bijak, dan memudahkan BPDASHL Indragiri Rokan dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana rehabilitas hutan dan lahan.

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait dengan penghidupan dari bidang pertanian. Dalam kehidupan, komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas.

Lembaga pertanian dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya terutama kebutuhan individu anggotanya berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial dan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan anggotanya. Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal mulai dari kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi dan politik.

BPDASHL Indragiri Rokan telah melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani. Pemberdayaan dilakukan agar para petani bisa mandiri dan bisa memanfaatkan dan melestarikan hutan dengan bijak. Pendekatan penyuluhan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Mengingat kondisi kelembagaan petani masih memiliki beberapa permasalahan antara lain manajemen organisasi yang masih lemah, belum produktif, belum

memiliki kekuatan hukum serta aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, modal, maupun pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha BPDASHL Indragiri Rokan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Semakin berkurangnya pohon sialang dan pohon besar lainnya sebagai tempat lebah membuat sarang madu akibat penebangan hutan secara liar dan tidak tebang pilih.
2. Laju kerusakan hutan dan lahan lebih cepat dari pada laju pemulihannya sehingga menghambat BPDASHL Indragiri Rokan dalam memberdayakan kelompok tani.
3. Kesulitan modal oleh petani madu sialang dan kurangnya jaringan pemasaran madu.
4. Sulitnya mengurus surat izin pengembangan bisnis serta rekomendasi kesehatan yang memakan biaya perlembar surat sebesar Rp. 700.000,- per lembar di Kantor Kecamatan
5. Belum kuatnya koordinasi antara pemerintahan desa dengan BPDASHL Indragiri Rokan.
6. Belum optimalnya pengawasan bagi kelompok tani.
7. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 pasal 2, bahwa salah satu tugas pokok Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan adalah pengembangan kelembagaan.

Pengembangan kelembagaan belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya terdapat berbagai kekeliruan dalam pengembangan kelembagaan. Menurut Syahyuti (2003), terdapat 9 (sembilan) bentuk kekeliruan dalam pengembangan kelembagaan, yaitu:

- 1) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, namun lemah dalam ikatan vertikal. Kekeliruan ini kemudian diperbaiki dengan mengembangkan konsep kelembagaan agribisnis, yang lebih dipentingkan adalah ikatan-ikatan vertikal.
- 2) Kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan *social capital* masyarakat secara mendasar. Tidak mengherankan jika sebuah kelembagaan akan bubar sesaat setelah ditinggalkan pelaksanaannya.
- 3) Struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam, yang bias kepada bentuk kelembagaan usahatani padi sawah sawah irigasi teknis di Pantura Jawa. Hal ini merupakan generalisasi yang terburu-buru dan sembrono, serta analogi yang tergesa-gesa dan tidak relevan (Mundiri, 1999).
- 4) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual terbatas kepada pengurus dan tokoh-tokoh dengan prinsip "*trickle down effect*", bukan *social learning approach*.
- 5) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur

struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti perkembangan aspek kulturalnya (visi, motivasi, semangat, manajemen, dan lain-lain).

- 6) Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding nonmaterial, atau merupakan perubahan yang materialistik.
- 7) Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yang ada sebelumnya, termasuk merusak hubungan-hubungan horizontal yang telah ada.
- 8) Jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya, pengembangan kelembagaan masih lebih merupakan jargon politik daripada kenyataan yang riil di lapangan.
- 9) Kelembagaan pendukung untuk usaha pertanian tidak dikembangkan dengan baik, karena struktur pembangunan yang sektoral.

Pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan oleh BPDASHL Indragiri Rokan adalah pengembangan kelembagaan kelompok tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan, bentuk kegiatan pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadakan sosialisasi untuk kelompok tani
- 2) Memberikan penyuluhan kepada kelompok tani
- 3) Memberikan pelatihan kepada kelompok tani

- 4) Memberikan bantuan alat penunjang produksi kepada kelompok tani
- 5) Melakukan pendampingan bagi kelompok tani

Bentuk-bentuk penguatan kelembagaan tersebut juga termasuk ke dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, karena dalam penguatan kelembagaan yang dilakukan BPDASHL Indragiri Rokan terdapat pemberian penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan, yang mana semuanya itu termasuk ke dalam penguatan kognisi atau menjadikan kognisi masyarakat lebih baik. Sebagaimana pendapat Teguh (2004:80), bahwa pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua anggota kelompok tani ikut dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya kelompok tani yang diberdayakan oleh BPDASHL Indragiri Rokan. Jadi pembinaan hanya dijalankan kepada pengurus dari setiap kelompok tani.

Kenyataannya dapat dikatakan bahwa tujuan BPDASHL Indragiri Rokan dalam memberdayakan masyarakat belum tercapai. Karena masyarakat hanya mandiri sesaat setelah diberikan penyuluhan saja, sedangkan kelanjutannya atau dalam beberapa bulan ke depan tidak sesuai dengan harapan BPDASHL Indragiri Rokan sendiri. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi anggota kelompok dalam kegiatan kelompok serta masih ada petani yang masih bekerja sendiri-sendiri. Seharusnya masyarakat yang diberikan penyuluhan tidak hanya diberdayakan hingga mandiri saja, tetapi harus tetap diawasi atau selalu diberikan pendampingan, dan perlu dilakukan pemberdayaan ulang secara berkala.

Menurut Sumodingningrat (2004:41), pemberdayaan tidak bersifat selamanya, targetnya hanya sampai masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski jatuh tetapi harus tetap dijaga agar tidak jatuh.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa pemberdayaan tidak hanya berhenti di saat masyarakat telah mandiri saja, tetapi BPDASHL Indragiri Rokan harus tetap menjaga daya yang telah diberikan agar tetap atau meningkat atau terus mengalami perbaikan sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Petani madu hutan termasuk ke dalam kelompok tani HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), berikut adalah kelompok tani madu hutan yang terdapat di Desa Sahilan Darussalam, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kelompok Tani Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Nama Kelompok Tani	Kenggotaan Kelompok Tani	Jenis HHBK
Kelompok Tani Madu Sailan, Desa Sahilan Darussalam Kec. Gunung Sahilan	1. Bahrizon (Ketua)	Perlebahan
	2. Burhan (Wakil Ketua)	
	3. Mersusanto (Sekretaris I)	
	4. Zuhri Askal (Sekretaris II)	
	5. H. Azwin (Bendahara)	
	6. Marlinus (Pengawas)	
	7. Sukarno (ICS)	
	8. Tamjon Arifin (ICS)	
	9. Triyono (ICS)	
	10. Darusit (Anggota)	
	11. Penli (Anggota)	
	12. Mukhtar (Anggota)	
	13. Samsi (Anggota)	
	14. Gusrianto (Anggota)	
	15. Yusrizal (Anggota)	
	16. Asri Ance	

	(Anggota)	
17.	Bambang (Anggota)	
18.	Riko (Anggota)	
19.	Aris (Anggota)	
20.	Riki Fajar (Anggota)	
21.	Samsu Zabbar (Anggota)	
22.	Gunawan (Anggota)	
23.	Yuharman (Anggota)	
24.	Nasir Lubis (Anggota)	
25.	Iman (Anggota)	
26.	Toni (Anggota)	
27.	Syafriigon (Anggota)	

Sumber: BPDASHL Indragiri Rokan Provinsi Riau, 2017

Kelompok tani yang ada di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang telah diberdayakan oleh BPDASHL Indragiri Rokan adalah Kelompok Tani Madu Sailan. Kelompok tani tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Di sisi lain, potensi madu hutan di Desa Sahilan Darussalam belum terkelola dengan baik dan umumnya pengelolaannya masih sederhana baik dari cara panen, pasca panen, kelembagaan maupun pemasaran. Pengelolaan madu juga belum mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Walaupun kelompok petani tersebut sudah diberikan penguatan kelembagaan secara tuntas oleh BPDASHL Indragiri Rokan, tetapi kelompok tani masih menemukan beberapa kendala seperti belum adanya mesin untuk mengeringkan tepung sari, terbatasnya teknologi penunjang produksi, dan masih membutuhkan bantuan modal. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait pengelolaan madu di Kabupaten Kampar antara lain meningkatnya kerusakan hutan kepungan sialang dan penebangan pohon sialang karena perubahan

penggunaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan.

Semakin berkurangnya pohon sialang merupakan akibat dari kerusakan hutan dengan penebangan secara liar dan tidak tebang pilih. epunahan Pohon Sialang akan berdampak kepada produksi madu hutan yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan secara turun temurun. Jika Pohon Sialang ini punah maka masyarakat yang selama ini memanfaatkan madu hutan akan kehilangansalah satu sumberpendapatanmereka. Apabila Pohon Sialang tumbuh diatas tanah milik pemerintah maupun tanah milik penduduk pembagian hasil juga akan ditentukan oleh kelompok tani, namun tetap didalam pengawasan ketua adat atau biasa disebut ninik mamak hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian. Rambu-rambu larangan menebang untuk pohon yang sudah disarangi oleh lebah sudah ada lama, namun sangsi itu berlaku untuk perusahaan dengan denda Rp. 25.000.000,-tapi jika ditebang oleh masyarakat kampung (anak dan keponakan) sangsi dalam aturan adat itu tidak pernah ditegakkan. Selain mengalami kepunahan, pengembangan Madu Sialang masih mengalami beberapa hambatan. Diantaranya adalah ancaman satwa liar dan ancaman dari manusia. Ancaman dari satwa liar seperti elang dan beruang sedangkan ancaman dari manusia seperti pencurian madu, klaim kepemilikan (Maulana, 2017: 1074).

Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu tanpa memperhatikan kelestariannya dapat merusak ekosistem hutan, dapat menimbulkan bencana alam berupa banjir, longsor, dan dampak-dampak negatif lainnya. Sehingga dapat mengganggu tujuan dan fungsi dari BPDASHL Indragiri Rokan, khususnya di wilayah Desa Sahilan Darussalam

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Padahal apabila madu dikelola dengan baik, akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk madu, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dengan demikian pengembangan madu merupakan hal yang sangat strategis untuk dilaksanakan.

Selain hal di atas permasalahan pada pemanfaat madu sialan adalah kekurangan modal yang dirasakan oleh para petani madu. Masyarakat sekitar taman nasional sebenarnya telah mulai membentuk kelompok industri rumah tangga (*home industry*) untuk pengembangan madu sialang sejak 2004. Kini ada empat sentra pengembangan madu sialang TNTN, yakni di Desa Lubuk Kembang Bungo dan Air Hitam di Kabupaten Pelalawan, Desa Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar, dan Logas Tanah Datar di Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga kini produk yang dihasilkan belum memberikan nilai tambah karena masih dijual dalam bentuk curah dengan harga berkisar Rp17.000-Rp20.000 per kilogram (kg). Petani sempat mengembangkan produk dalam bentuk kemasan botol dan mengurangi kadar air madu, sehingga harga jual bertambah menjadi berkisar Rp25.000-Rp30.000 per 350 mililiter. Namun, produk pengembangan petani tidak bisa menembus pasar karena belum ada sertifikasi dari Aliansi Organik Indonesia (AOI). Para petani mengaku cukup kesulitan untuk memenuhi persyaratan usaha dan pengembangan bisnis. Biaya untuk mengurus izin usaha juga dinilai cukup besar, seperti untuk mendapatkan rekomendasi pengurusan SIUP yang hanya satu lembar memakan biaya sekitar Rp700 ribu di kantor kecamatan

(<https://www.antarariau.com/berita/9355/petani-madu-sialang-tesso-nilo-kesulitan-modal>).

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terlihat dari beberapa fenomena berikut.

- 1) Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok tani dalam kegiatan kelompok masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok.
- 2) Masih terdapat keluhan atau kendala dari kelompok tani yang telah diberdayakan. Hal ini dikarenakan masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi, kesulitan permodalan, maupun jalur pemasaran yang terbatas.
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh BPDASHL Indragiri Rokan. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus.
- 4) Belum optimalnya pengawasan bagi kelompok tani yang telah diberdayakan. Diketahui dari peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah pemersatu kegiatan anggota belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya petani yang bekerja sendiri-sendiri.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan fenomena tersebut, dan mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat dan peranan BPDASHL Indragiri Rokan dalam memberdayakan masyarakat agar tidak terjadinya perusakan lingkungan di Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Petani Madu Hutan oleh Balai**

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan melalui judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat petani madu hutan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat petani madu hutan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?

Konsep Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suparjan dan Hempiri (2003:43), pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

Menurut Sumodiningrat dalam Teguh (2004:78), pemberdayaan adalah istilah Indonesia yang berarti memberi daya bukan kekuasaan, pemberdayaan juga disebut sebagai pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Prijono & Pranarka (1996:77), pemberdayaan mengandung dua arti: (1) *to give power or authority*, yaitu memberikan kekuasaan,

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya; dan (2) *to give ability to or enable*, yaitu memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: (1) kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan (2) kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, 2004:46)

Menurut Winarni (1998:75), terdapat perbedaan makna pemberdayaan barat dan Indonesia, pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya. Pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu: (1) pengembangan (*enabling*); (2) memperkuat potensi atau daya

(*empowering*); dan (3) terciptanya kemandirian.

Menurut Mardikanto & Soebiato (2013:41), *enabling* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Lebih lanjut Mardikanto & Soebiato (2013:41) menjelaskan bahwa *empowering* adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar

Menurut Teguh (2004:80), pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang

diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Lebih lanjut Menurut Teguh (2004:80-81) mengatakan bahwa terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang idea.

Menurut Sumodingningrat (2004:41), pemberdayaan tidak bersifat selamanya, targetnya hanya sampai masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski jatuh tetapi harus tetap dijaga agar tidak jatuh. Sedangkan Scumacher dalam Teguh (2004:90) mengatakan bahwa pandangan pemberdayaan sebagai suatu

bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu.

2. Pengelolaan Lingkungan

Menurut Soemarwoto (2004:17), lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UUPPLH, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Sodikin (2007:26), bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan pula kewenangan negara, yaitu hak menguasai dan mengatur oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memberikan wewenang untuk mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, penggunaan kembali (daur ulang), penyediaan, pengelolaan dan pengawasan melalui perbuatan hukum dan mengatur pajak serta retribusi lingkungan. Oleh karena itu, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan

lingkungan hidup di Indonesia adalah wawasan nusantara, karena kondisi obyektif geografi nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Budimanta (2005:32), pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Menurut Sudarmadji (2008:28), pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Menurut Salim (2003:42), pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuitas sosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal: ekonomi (finansial, modal mesin),

modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi-sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).

Menurut Marlina (2009:24), pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Menurut Soemarwoto (2004:161), pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan serta mempunyai sampai masa mendatang. Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: (a) terpeliharanya proses ekologi yang esensial; (b) tersedianya sumberdaya yang cukup; dan (c) lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta menafsirkan data yang ada. Menurut Emzir (2010:28), penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individu, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti orientasi

politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya.

Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono (2008:29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan Provinsi Riau. Alasan pemilihan desa tersebut dikarenakan Desa Sahilan Darussalam memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan namun masih terdapat beberapa permasalahan walupun sudah diberdayakan oleh BPDASHL Indragiri Rokan Provinsi Riau.

Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Ketua Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan
2. Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan
3. Ketua Kelompok Tani Madu Sailand Desa Sahilan Darussalam
4. Anggota Kelompok Tani Madu Sailand Desa Sahilan Darussalam

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer atau data utama penelitian bersumber dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder atau pendukung bersumber dari dokumentasi penelitian, dan data mengenai lokasi penelitian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Namun yang menjadi data

primer atau utama penelitian berasal dari teknik wawancara.

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut akan dianalisa dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil wawancara yang lain, hasil wawancara dengan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, serta berpedoman kepada landasan teori, selanjutnya ditambahkan dengan keterangan untuk dianalisa secara deskriptif kualitatif, kemudian diambil kesimpulan dan deskripsinya ke dalam bentuk tulisan sebagai hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjawab dari permasalahan yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktorat Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL). Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan dipimpin oleh seorang Kepala. Dasar hukum pembntukan Balai Pengelolaan DASHL adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 januari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

BPDASHL Indragiri Rokan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah ini Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) yang melaksanakan sebagian tugas dari

Direktorat Jendral PDASHL dalam mewujudkan misi dan visi Pembangunan Nasional. Visi dan misi pembangunan ditetapkan secara nasional dan dituangkan pada RPJMN, sedangkan untuk tingkat Kementrian/Lembaga dan Direktorat Jendral Menjabarkan visi dan misi pembangunan nasional dengan kebijakan-kebijakan strategis masing-masing bidang.

Desa Sahilan Darussalam adalah salah satu desa yang berada atau berlokasi di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa tersebut dilalui oleh aliran sungai Gunung Sahilan, yang termasuk salah satu desa rawan banjir, namun tidak semua area desa digenangi oleh banjir. Desa Sahilan Darussalam memiliki luas wialayah 18,85 Km² dengan perensetase sebesar 2,62% dari total luas wilayah Kecamatan Gunung Sahilan.

Pembahasan

Pemberdayaan yang dibahas disesuaikan dengan pendapat Winarni (1998), yaitu *enabling*, *empowering*, dan terciptanya kemandirian.

Enabling dilakukan dengan memotivasi, dan membangkitkan kesadaran. BPDASHL Indragiri Rokan memotivasi kelompok tani dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan. Sedangkan membangkitkan kesadaran dilakukan dalam bentuk dorongan akan adanya hasil hutan selain kaya dan memiliki potensi ekonomi besar bagi para petani.

Empowering dilakukan dengan memperhatikan pendidikan atau pengetahuan, derajat kesehatan, modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Dalam hal pendidikan atau pengetahuan, BPDASHL Indragiri Rokan hanya sebatas memberikan pelatihan kepada kelompok tani, tanpa

memperhatikan kemampuan kognitif masing-masing petani, sehingga pengetahuan anggota kelompok petani tidak merata.

Kemudian mengenai derajat kesehatan tidak termasuk hal yang diperhatikan oleh BPDASHL Indragiri Rokan, begitu juga dengan modal maupun teknologi. Sedangkan mengenai informasi, menurut BPDASHL mereka selalu terbuka bagi kelompok tani.

Begitu juga halnya dengan lapangan kerja dan pasar. Lapangan kerja tergantung dari produksi madu yang diperoleh, jika jumlah produksi banyak, maka membutuhkan banyak tenaga kerja, jadi sangat tergantung dengan kondisi. Kemudian masalah pasar sudah ada kerjasama dengan pihak swasta, tetapi ada juga dilakukan secara individu oleh para petani. Namun, jika ditinjau dari aspek terciptanya kemandirian, dikatan anggota kelompok tani Madu Sailan belum mandiri karena selalu perlu dukungan dari berbagai pihak dalam hal pengetahuan, modal, teknologi dan lain sebagainya.

Melalui hasil wawancara sebelumnya, diketahui beberapa kendala atau hambatan dalam memberdayakan kelompok tani di Kabupaten Kampar, yaitu terkendalanya masalah penebangan hutan yang membuat produksi madu menurun. Sebagaimana tupoksi pengembangan kelembagaan BPDASHL Indragiri Rokan, bantuan yang diberikan hanya bantuan teknologi namun tidak didukung dengan bantuan modal. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi hanya diberikan kepada kelompok tani saja, tidak pada seluruh masyarakat, sementara tidak semua masyarakat terkonsentrasi pada setiap kelompok tani, implikasinya masih ada pengrusakan hutan dengan adanya penebangan hutan dan pembukaan lahan baru secara liar. Mengingat masih

terbatasnya tupoksi pemerdayaan yang dilakukan BPDASHL Indragiri Rokan, menyebabkan kurangnya perhatian khusus pada pengetahuan kelompok tani, derajat kesehatannya, terbatasnya bantuan teknologi, kurangnya bantuan modal dan masalah penebangan hutan secara liar yang membuat turunnya hasil produksi madu, Sehingga kelompok tani Madu Salian masih membutuhkan banyak bantuan yang belum dapat terealisasikan, kondisi-kondisi tersebutlah yang menjadikan kelompok tani Madu Sailan belum mandiri.

Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat petani madu hutan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar belum optimal. Khususnya aspek *empowering* dan aspek terciptanya kemandirian. Aspek *empowering* belum optimal karena kurang memperhatikan tingkat pengetahuan kelompok tani dalam mengelola madu hutan, kurang memperhatikan derajat kesehatan kelompok tani, kurangnya bantuan teknologi tepat guna, dan kurangnya bantuan modal. Sehingga aspek terciptanya kemandirian belum optimal pada kelompok tani madu Sailan.
2. Faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat petani madu hutan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah faktor (1) anggaran atau pendanaan; (2) masih banyaknya masyarakat yang belum tergabung kedalam

kelompok tani (3) kurangnya teknologi tepat guna, dan (4) penebangan hutan secara liar.

Saran

Penulis selaku peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. BDASHL Indragiri Rokan seharusnya bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa untuk memperhatikan derajat kesehatan kelompok tani madu hutan, sehingga produksi madu hutan tidak terganggu oleh masalah kesehatan anggota kelompok taninya
- b. Anggaran atau pendanaan seharusnya dapat disediakan oleh BDASHL Indragiri Rokan dengan bekerjasama dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta dalam kegiatan pendanaan BPDASHL Indragiri Rokan
- c. BPDASHL Indragiri Rokan seharusnya dapat bekerjasama dengan kelompok tani madu hutan untuk mengajak petani madu lainnya yang belum bergabung agar masuk kedalam kelompok tani sehingga dapat diberdayakan oleh BPDASHL Indragiri Rokan.
- d. Masih kurangnya teknologi tepat guna dapat diatasi dengan bekerjasama dengan kementerian pertanian atau instansi terkait agar teknologi tepat guna untuk pengelolaan madu hutan dapat dilengkapi sesuai kebutuhan petani.
- e. Adanya penegakan yang tegas dalam rangka melestarikan pohon sialang dan pohon besar lainnya sebagai tempat lebah membuat madu.

- f. Adanya pengembangan usaha baik secara pendanaan modal maupun pemasaran madu.

Daftar Pustaka

Buku:

- Budimanta. 2005. *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok Dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marlina. 2009. *Karakteristik untuk Mendefinisikan Sustainable*. Jakarta: Wordpress.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mundiri. 1999. *Logika*. Bandung : PT Rajagrafindo Persada
- Prijono Dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rianse, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Sodikin. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sudarmadji. 2008. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Dies UGM ke-58 Pembangunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Indonesia di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2007
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sumodingningrat. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suparjan Dan Hemptiri. 2003. *Pengembangan Masyarakat: dari Pengembangan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Teguh, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarni. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.

Dokumentasi:

Undang-undang nomor 17 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 18.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0//1/201

6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar). *Jurnal*. Universitas Riau

Jurnal:

Maulana, Ridha. 2017. Kontribusi Usahatani Madu Sialang Terhadap Pendapatan Keluarga Petani (Studi Kasus di Desa

Internet:

<https://www.Antarariau.Com/Berita/9355/Petani-Madu-Sialang-Tesso-Nilo-Kesulitan-Modal>